



**Penyerahan LHP Kinerja Perizinan, Fiskal, Pendidikan Vokasi, dan Vaksinasi, serta
LHP Kepatuhan Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui BLT-DD
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021**

Bandung – Humas dan TU Perwakilan

Kamis (30/12), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menutup tahun 2021 dengan serangkaian acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2021 atas Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan. Rangkaian penyerahan LHP tersebut adalah :

1. Penyerahan LHP Kinerja Perizinan Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. Triwulan III 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada hari Kamis (23/12);
2. Penyerahan LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui BLT-DD TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka pada hari Jumat (24/12);
3. Penyerahan LHP Kinerja atas Kebijakan Fiskal TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa (28/12);
4. Penyerahan LHP Kinerja atas Pendidikan Vokasi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan LHP Kinerja atas Vaksinasi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung pada hari Kamis (30/12).

Rangkaian penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 dan ruang kelas lantai 4 Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Penyerahan LHP langsung dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Agus Khotib, dengan didampingi para Kepala Subauditorat, Pengendali Teknis, dan Ketua Tim Pemeriksa kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah, atau yang mewakili. LHP yang dihasilkan tersebut merupakan *output* dari kegiatan pemeriksaan yang telah dikembangkan sesuai kriteria *Audit Design Matrix (ADM)* yang telah dikomunikasikan dengan entitas pemeriksaan.

Rangkaian penyerahan LHP Semester II Tahun 2021 dijadwalkan akan kembali diserahkan pada Januari 2022 mendatang. Agenda LHP Semester II Tahun 2021 yang akan diserahkan adalah LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi, serta LHP Kinerja atas Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kota Bogor.

Baik LHP Kinerja maupun LHP Kepatuhan tidak menghasilkan suatu opini atas Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Agus Khotib selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat menegaskan, “Besarnya manfaat dari pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.” Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai temuan pemeriksaan sebagaimana UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

(/humas bpk)**